

Lindungi Martabat Ekologi Aceh



Teuku Kemal Fasya dan budayawan Indonesia, Radhar Panca Dahana (alm). Foto : TKF

Teuku Kemal Fasya

Bulan Juni lalu, Universitas Malikussaleh melakukan kegiatan Dies Natalis ke-53. Salah satunya aksi bersih pantai. Pantai yang dipilih adalah Ujong Blang, Lhokseumawe, salah satu destinasi wisata pantai paling diminati pengunjung, dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, hingga Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Aksi itu bermuara sebagai kampanye lingkungan, karena problem degradasi ekologis Aceh semakin menjadi-jadi. Pada saat itu terkumpul sampah hampir 200 kg, di antaranya sampah tempurung kelapa, jaring bekas, kantong plastik, pipet, botol minuman hingga pampers. 25 kantong plastik besar berhasil menggusur sampah dari tepi pantai ke Alue Lim, tempat pembuangan akhir (TPA).

Beberapa hari kemudian, sebagai dosen pengampu MK Antropologi Ekologi, saya memberikan tugas kelompok sebagai final untuk menganalisis beberapa kasus terdekat melalui observasi dan wawancara. Salah satunya melihat problem sampah di pantai Ujongblang.

Kesimpulannya, hanya dalam satu minggu sejak aksi bersih pantai, mahasiswa “memotret” sampah kembali berkelabang di tiap sudut pantai. Artinya, gerakan bersih pantai selalu terhempas oleh aksi menista pantai, baik oleh pengunjung atau pemilik café yang tidak mau mengelola sampah dan memilih melarungkan ke laut.

Pada kasus lain, saya menugaskan kasus penebangan pohon kota. Kasusnya adalah penebangan pohon kota di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe. Dari survei lapangan ditemukan fakta bahwa penebangan 6-7 pohon itu dilakukan untuk mengubah konstruksi depan lapangan agar semakin asri. Sayangnya pilihan membat “kanopi hijau” itu semakin tidak asri dan membarakan Lhokseumawe yang memang sudah panas.

Melukai lingkungan

Kiranya model pengembangan wilayah kota-kota di Aceh sedang tren dengan melukai lingkungan. Kasus penebangan pohon kota sedang massif terjadi di setiap sudut Nanggroe. Beberapa pohon ikonik pelan-pelan menghilang dari pandangan.

Proyek pelebaran jalan dan pembangunan infrastruktur dengan mudah menebas pohon-pohon pelindung kota seperti angšana (*Pterocarpus indicus*), mahoni (*Swietenia mahagoni*), beringin (*Ficus benjamina*), dan asam jawa (*Tamarindus indica*). Termasuk pohon “salah lokasi”, proyek masa SBY, yaitu trembesi (*Samanea saman*). Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe termasuk menghabiskan semua pohon trembesi yang mereka tanam belasan tahun lalu.

Lhokseumawe termasuk kota yang banyak kehilangan pohon kota. Demikian pula beberapa “kota kecil” yang diklasifikasikan sebagai wilayah urban atau kota satelit seperti Trienggadeng, Beureunuen, Geurugok, Jantho, Montasik, dan Lampeunerut semakin gersang dan mengancam kesehatan warga karena kurangnya biosfer penyuplai oksigen.

Padahal menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan syarat perencanaan ruang dan wilayah kota sehat harus menyediakan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH), dan 20 persennya merupakan RTH publik. Artinya jangkar tanggung jawab ada pada pemerintah kota/Muspika. Jika tidak, mereka dianggap sebagai pelanggar lingkungan.

Sebanding dengan penataan RTH kota, perencanaan pengelolaan wilayah hutan di beberapa daerah di Aceh terlihat amburadul. Tren balkanisasi lingkungan di Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues semakin membuhul.

Menurut Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan (HAKA) Aceh, dalam kurun Juni 2020 – Juli 2021 saja, Aceh telah kehilangan 19.443 hektar tutupan hutan dan 251 ribu hektar berada dalam keadaan rusak atau kritis.

Tanggal: 11 August 2022

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Repository Media](#),